

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Instansi pemerintah merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan pengertian otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kota Surakarta memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik secara transparan dan mengkoordinasi aparatur pemerintah daerah seperti Sekeriat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu, pembentukan perangkat daerah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi.

Kinerja aparat pemerintah selalu menjadi sorotan banyak pihak dan sebagian besar mempengaruhi kinerja sektor publik. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (Perpres RI No 29 Tahun 2014). Sedangkan menurut Mangkunegara

(2014) dalam Widiyanti dan Dewi (2017) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kuantitas dalam kinerja diukur dari apresiasi aparat pemerintah terhadap hasil dari jumlah aktivitas yang ditugaskannya dan kualitas diukur dari apresiasi aparat pemerintah terhadap keterampilan dan kemampuan dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Ukuran kinerja dalam suatu organisasi guna untuk evaluasi dan perencanaan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu kinerja yang tinggi dalam organisasi dalam suatu organisasi mengandung arti adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi oleh anggota dalam mengerjakan atau menyelesaikan serangkaian tugasnya.

Anggaran menjadi salah satu masalah dalam pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh pemerintah. Hariani dan Veny (2018) mengemukakan anggaran merupakan alat perencanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan pelayan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter, serta sebagai alat pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintah. Keseluruhan strategi operasional instansi berupa tujuan dan rencana baik jangka pendek maupun jangka panjang tertuang di dalam anggaran. Penyusunan anggaran dalam perusahaan dan pemerintah sangat berbeda, jika penyusunan anggaran dalam perusahaan berorientasi pada profit perusahaan sedangkan penyusunan anggaran dalam pemerintah berorientasi pada pelayanan publik untuk kesejahteraan publik. Penyusunan anggaran menjadi alat yang penting dalam perencanaan dan pengendalian yang efektif pada suatu organisasi.

Agar pelaksanaan penyusunan anggaran dalam organisasi dapat berjalan secara efektif, maka penerapan partisipasi dalam penyusunan anggaran harus diperhatikan. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan suatu proses menentukan tujuan dan mempersiapkan anggaran yang dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Para pelaksana penyusunan anggaran harus berpartisipasi untuk merencanakan anggaran, agar pelaksanaannya berjalan efektif. Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja pimpinan dalam satuan organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Pengelolaan keuangan yang baik dapat menunjang keberhasilan dalam desentralisasi. Dalam UUD 1945 desentralisasi merupakan amanat konstitusi dan konsensus komponen bangsa yang memiliki cita-cita luhur untuk menciptakan bangsa Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera. Rondinelli dan Cheema (1998) dalam Rante, *et al.* (2014) mengemukakan bahwa desentralisasi adalah transfer atau pendelegasian kewenangan dari pemerintahan tertinggi dan badan-badannya kepada organisasi di daerah, unit-unit sub-ordinat pemerintah, pemerintah semi otonom, otoritas regional, otoritas fungsional, pemerintahan lokal otonom untuk merencanakan dan mengelola fungsi publik. Desentralisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan keuangan, menjamin keadilan, dan pemerataan serta demokratisasi di daerah. Desentralisasi harus dipahami dan diyakini sebagai sesuatu yang dinamis untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini kinerja aparat pemerintah yang bertanggungjawab sangat

dibutuhkan dalam implementasi desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi organisasi mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki, dapat menangani peristiwa, bertindak tanpa menunggu dan meningkatkan kualitas keputusan yang mendorong kinerja menjadi lebih baik (Handayani dan Endang, 2018).

Motivasi kerja juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah karena motivasi kerja dapat menentukan baik buruknya kinerja seseorang dalam organisasi. Dalam usaha meningkatkan pekerjaannya, seseorang membutuhkan semangat atau memotivasi pada diri sendiri. Oleh karena itu motivasi kerja sering diartikan sebagai faktor yang mendorong perilaku seseorang. Dalam suatu organisasi yang memiliki motivasi tinggi akan lebih giat dan gigih untuk mencapai hasil kerja yang lebih optimal. Motivasi kerja penting dimiliki oleh seluruh pegawai sebagai dorongan untuk memenuhi kebutuhan sehingga pegawai dapat menyesuaikan dengan lingkungannya secara positif agar juga dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai dan menyelesaikan tugas organisasi dengan efektif (Pratolo, *et al.* 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pada organisasi perangkat daerah dengan mengambil judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Desentralisasi, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka bisa diketahui rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja organisasi perangkat daerah?
2. Apakah ada pengaruh desentralisasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah?
3. Apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja organisasi perangkat daerah?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap organisasi perangkat daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang partisipasi penyusunan anggaran, desentralisasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kinerja organisasi perangkat daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai faktor-faktor yang memengaruhi organisasi perangkat daerah untuk memenuhi kinerjanya,
- b. Dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi, dan perluasan untuk penelitian selanjutnya tentunya terkait dengan kinerja organisasi perangkat daerah.
- c. Hasil penelitian ini sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi perangkat daerah yang ada dalam penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi terkait penyajian dan analisis data. Menyajikan dan menjelaskan hasil analisis data serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran.